

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.¹ Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi, yaitu (1) *pure-profit organization*, (2) *quasi-profit organization*, (3) *quasi-nonprofit organization*, (4) *pure-nonprofit organization*.² Perbedaan empat tipe organisasi tersebut terutama dilihat dari tujuan operasi dan sumber pendanaannya.

Tujuan *pure-profit organization* adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga dapat dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditur. *Quasi-profit organization* memiliki tujuan menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Organisasi tersebut mendapatkan sumber pendanaan dari investor swasta, investor pemerintah, kreditur, dan para anggota. *Quasi-nonprofit organization* bertujuan menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa untuk melayani masyarakat dan mendapatkan keuntungan (surplus). Sumber pembiayaan organisasi

¹ Mohamad M, Firma S, dan Heribertus Andre P, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2006), hal. 3.

² Ibid.

ini diperoleh dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditur. *Pure-nonprofit organization* mempunyai tujuan menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi tersebut berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hibah, sumbangan, penjualan aset negara.³

Tipe organisasi *quasi-nonprofit organization* dan *pure-nonprofit organization* dapat digolongkan dalam area sektor publik, sehingga organisasi sektor publik sering dikenal sebagai organisasi nonprofit (nirlaba) atau *nonprofit oriented*. Organisasi bertipe *quasi-profit organization* dan *pure-profit organization* lebih dikategorikan dalam sektor swasta, maka perusahaan swasta cenderung disebut dengan organisasi profit atau *profit oriented*.

Sektor publik dan sektor swasta memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik antara sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat secara lebih rinci dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi yang digunakan.⁴

Organisasi sektor publik mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, sedangkan sektor swasta bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk

3 Ibid., hal. 4.

4 Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar* (Malang: UMM Press, 2005), hal. 17.

mencari laba (*nonprofit motive*), dan perusahaan atau sektor swasta merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (*profit motive*).⁵ Sumber pendanaan organisasi sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, iuran anggota, subsidi, dan sumbangan dari donatur. Perusahaan swasta mendapatkan sumber pembiayaan yang berupa pembiayaan internal dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, dan juga pembiayaan eksternal dari utang bank, obligasi, penerbitan saham.⁶

Pertanggungjawaban organisasi sektor publik ditujukan kepada masyarakat (publik), sedangkan pertanggungjawaban sektor swasta lebih kepada pemegang saham dan kreditur. Struktur organisasi sektor publik adalah birokratis, kaku, dan hirarkis. Sektor swasta memiliki struktur organisasi yang fleksibel yaitu datar, piramida, dan lintas fungsional. Karakteristik anggaran organisasi sektor publik adalah terbuka untuk publik, sedangkan karakteristik anggaran sektor swasta cenderung tertutup untuk publik. Sistem akuntansi yang digunakan organisasi sektor publik adalah *cash accounting*, dan sektor swasta lebih menggunakan sistem akuntansi *accrual accounting*.⁷

Secara lebih khusus, organisasi sektor publik (nirlaba) memiliki ciri-ciri yang ditandai dengan sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Organisasi nirlaba juga menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan

5 Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 3.

6 Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.8.

7 Ibid.

laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Selain itu, tidak ada kepemilikan seperti pada organisasi perusahaan atau swasta, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali.⁸ Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah.⁹ Contoh organisasi sektor publik (nirlaba) antara lain: Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan (sekolah, puskesmas, dan rumah sakit), Organisasi Tempat Peribadatan (masjid, gereja, vihara, kuil).¹⁰

Gereja termasuk dalam organisasi sektor publik (nirlaba) nonpemerintah. Keuskupan termasuk bagian dari gereja Katolik. Keuskupan merupakan persekutuan paroki-paroki dalam batas-batas teritorial tertentu yang dipimpin oleh Uskup. Gereja Keuskupan Agung Semarang (KAS) mencakup 4 (empat) keuskupan (vikaris episkopis), yaitu Surakarta, Semarang, Kedu, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). KAS juga memiliki persekutuan paroki-paroki yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) paroki. Paroki-paroki tersebut antara lain: Paroki Banteng, Paroki Kotabaru, Paroki Bintaran, Paroki Somohitan, Paroki Jetis, Paroki Mlati, dan banyak paroki lainnya.

Paroki-paroki memperoleh sumber daya (dana) yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota (umat) dan

8 Ihyaul, op. cit., hal. 9.

9 Mohamad, op. cit., hal. 215.

10 Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 3.

para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari paroki tersebut. Sumber daya paroki disebut dengan keuangan paroki. Keuangan paroki berwujud uang dan harta benda paroki yang berasal dari kolekte, uang persembahan, sumbangan, dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan peraturan gereja yang berlaku. Paroki menghasilkan jasa dalam bentuk pelayanan tanpa bertujuan memupuk laba.

Paroki-paroki memiliki tanggungjawab untuk mengelola uang dan harta bendanya dengan baik. Pengelolaan uang dan harta benda paroki tersebut harus dilaksanakan secara kredibel (transparan dan akuntabel) agar dapat mencerminkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Tanggungjawab pengelolaan sumber daya paroki ditujukan bagi umat, donatur, dan keuskupan. Pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan paroki melalui prosedur yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Keuskupan. Aturan mengenai prosedur pengelolaan keuangan paroki yang berlaku dari Keuskupan tersebut dapat ditemukan dalam pedoman keuangan dan petunjuk teknis keuangan paroki.

Pedoman keuangan dan petunjuk teknis keuangan paroki mensyaratkan terlaksananya pengelolaan harta benda paroki secara kredibel (transparan dan akuntabel). Transparan merupakan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Kata sesuai tersebut diartikan baik, dari sisi jumlah, sisi mekanisme atau sistem, prosedur, serta tata cara administrasi yang siap atau mudah untuk dipahami dan dikontrol. Akuntabel merupakan akurasi perhitungan dan pertanggungjawaban dalam suatu tata administrasi serta tata

pelaporan yang didukung oleh berbagai bukti dokumen dan nondokumen. Akuntabel juga memperlihatkan bahwa semua kegiatan atau transaksi telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Paroki Mlati sebagai salah satu paroki Keuskupan Agung Semarang juga wajib menyelenggarakan administrasi keuangan yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan paroki bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan pastoral. Salah satu bentuk penyelenggaraan administrasi keuangan yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dalam pengelolaan keuangan paroki melalui prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Keuskupan.

Prosedur yang berlaku dari Keuskupan mengenai pengelolaan keuangan paroki yang dapat berupa prosedur pencatatan penerimaan kas dan prosedur pencatatan pengeluaran kas, berfungsi sebagai pedoman yang memuat dan mengatur langkah-langkah tertentu yang harus diamati dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Paroki Mlati tengah berupaya untuk dapat mengelola keuangan paroki melalui prosedur yang transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“EVALUASI PENERAPAN PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PAROKI MLATI TAHUN 2007”**.

I.2.Rumusan Masalah

Keuskupan Agung Semarang (KAS) mengharapkan perkembangan pengelolaan keuangan paroki-paroki dalam wilayah teritorialnya dapat berjalan semakin baik. Pada tahun 2006, KAS mengadakan sosialisasi Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) bagi setiap paroki dalam wilayah teritorialnya. PTKAP berfungsi sebagai pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan secara teknis mengenai pengelolaan keuangan gereja bagi setiap paroki di KAS. Dalam perkembangannya, PTKAP tersebut dirancang, disusun, dan dibentuk lebih lanjut menjadi sebuah buku oleh Tim Akuntansi Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2008.

Pengelolaan keuangan Paroki Mlati harus dijalankan secara kredibel (transparan dan akuntabel) karena berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diberikan, khususnya kepada keuskupan dan umat, serta kepada para donatur pada umumnya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan paroki melalui prosedur yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Keuskupan. Pengelolaan keuangan paroki yang dilaksanakan melalui prosedur sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Keuskupan tersebut dapat berupa prosedur pencatatan penerimaan kas dan prosedur pencatatan pengeluaran kas.

Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) yang telah ditetapkan oleh Uskup merupakan pedoman umum dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi paroki. Paroki-paroki perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP) yang sesuai dengan kondisi khas paroki, agar dapat melaksanakan PKAP. PTKAP membantu memfasilitasi paroki sebagai pedoman dalam penyusunan PPKAP tersebut. PPKAP salah satunya minimal mencakup

prosedur pencatatan transaksi keuangan yang terjadi, yang dapat berupa prosedur pencatatan penerimaan kas dan prosedur pencatatan pengeluaran kas.

PTKAP yang diterbitkan pada tahun 2008 juga memfasilitasi paroki dalam penyusunan prosedur pencatatan transaksi keuangan. Dalam kenyataannya, Paroki Mlati telah menyusun dan menetapkan beberapa prosedur pencatatan transaksi keuangan, baik transaksi penerimaan kas maupun transaksi pengeluaran kas pada tahun 2007. Prosedur pencatatan transaksi keuangan tersebut antara lain prosedur pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, prosedur pencatatan pengeluaran uang untuk Bidang dan Tim Kerja, dan prosedur pencatatan pengeluaran uang untuk Kepanitiaan. Penyusunan dan penetapan prosedur pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Paroki Mlati pada tahun 2007 sebagai salah satu bentuk upaya Paroki Mlati mengikuti dan menerapkan sosialisasi PTKAP yang dijalankan pada tahun 2006. Paroki Mlati perlu melakukan penyesuaian dengan prosedur pencatatan transaksi keuangan yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2007 sesuai dengan PTKAP. Tujuan dari penyesuaian tersebut adalah agar dalam perkembangannya, prosedur pencatatan transaksi keuangan yang telah disusun serta ditetapkan pada tahun 2007 benar-benar sesuai dengan PTKAP sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
”Seberapa jauh ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki sudah diikuti dengan sesuai oleh Paroki Mlati dalam prosedur pencatatan transaksi keuangannya pada tahun 2007?”

I.3.Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada :

1. Penelitian ini dilaksanakan di Paroki Mlati.
2. Prosedur pencatatan transaksi keuangan yang dievaluasi difokuskan pada prosedur pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Bidang dan Tim Kerja, prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Kepanitiaan yang dilaksanakan oleh Paroki Mlati tahun 2007.
3. Secara umum peneliti mengevaluasi prosedur pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Bidang dan Tim Kerja dan untuk Kepanitiaan karena contoh prosedur pencatatan transaksi keuangan yang terdapat dalam PTKAP yang digunakan sebagai alat evaluasi hanya berupa prosedur pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Bidang dan Tim Kerja, prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Kepanitiaan.
4. Secara khusus prosedur pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan dievaluasi karena penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan bersifat rutin dan tidak terikat atau penggunaannya tidak dibatasi, sehingga diharapkan pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Bidang dan Tim Kerja menjadi salah satu fokus evaluasi karena berkaitan dengan pengeluaran kas tidak terikat untuk membiayai program kegiatan Bidang dan Tim Kerja Dewan Paroki.

Pengeluaran kas tersebut memerlukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang menjadi bagian dalam prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Bidang dan Tim Kerja, sehingga diharapkan pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang dan pelaksanaannya.

6. Prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Kepanitiaan dievaluasi karena berkaitan dengan pengeluaran kas tidak terikat untuk membiayai kepanitiaan dan program kegiatan yang dikoordinir dan atau langsung dilakukan oleh Dewan Paroki. Pengeluaran kas ini membutuhkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang menjadi bagian dalam prosedur pencatatan pengeluaran kas untuk Kepanitiaan, sehingga diharapkan pencatatannya dilaksanakan sesuai aturan yang ada sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang dan pelaksanaannya.
7. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan dalam PTKAP.
8. Kriteria sesuai adalah apabila otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati sudah sesuai atau sama dengan prosedur pencatatan transaksi keuangan paroki yang terdapat dalam PTKAP.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati menurut PTKAP.

I.5.Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Paroki Mlati

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi Paroki Mlati dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur pencatatan transaksi keuangan yang lebih baik menurut prosedur pencatatan transaksi keuangan paroki yang berlaku.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terutama pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik terutama mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba khususnya paroki.

I.6.Metode Penelitian

I.6.1.Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati tahun 2007.

I.6.2.Data yang Digunakan :

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data mengenai struktur organisasi Paroki Mlati tahun 2007.

2. Data mengenai *job description* bidang-bidang kerja yang ada di Paroki Mlati.
3. Dokumen-dokumen akuntansi yang digunakan Paroki Mlati tahun 2007.
4. Prosedur pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati tahun 2007.
5. Data mengenai gambaran umum Paroki Mlati berkaitan dengan penelitian ini yang berupa sejarah singkat berdirinya Paroki Mlati, pelayanan Pastor Paroki dan Dewan Paroki kepada umat, wilayah pelayanan, arah pelayanan, struktur pelayan umat, kegiatan pelayanan, dan praktik prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Data diperoleh melalui wawancara (tanya jawab) secara langsung dengan Pastor Kepala Paroki Mlati, Bendahara Paroki Mlati, Ketua Wilayah Santo Paulus Bolawen, dan Ketua Lingkungan Santo Paulus Bolawen. Data yang diperoleh melalui wawancara berupa langkah-langkah pelaksanaan dan otorisasi dalam pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati tahun 2007, dan gambaran umum Paroki Mlati.

2. Dokumentasi Data

Data diperoleh dengan mengutip dan mengkopi data-data yang diperoleh dari Bidang Sekretariat Paroki Mlati. Data yang diperoleh melalui dokumentasi data berupa struktur organisasi Paroki Mlati tahun 2007, *job description* bidang-bidang kerja yang ada di Paroki Mlati, dan dokumen-dokumen akuntansi yang

digunakan Paroki Mlati dalam pelaksanaan prosedur pencatatan transaksi keuangan tahun 2007.

I.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi prosedur pencatatan transaksi keuangan dalam PTKAP yang sudah dilakukan Paroki Mlati dalam pencatatan transaksi keuangannya pada tahun 2007.
2. Membandingkan otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, pengeluaran untuk Bidang dan Tim Kerja, dan pengeluaran untuk Kepanitiaan Paroki Mlati tahun 2007 dengan otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam prosedur pencatatan transaksi keuangan pada PTKAP.
3. Membuat kesimpulan atas hasil perbandingan antara otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam pencatatan penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, pengeluaran untuk Bidang dan Tim Kerja, dan pengeluaran untuk Kepanitiaan Paroki Mlati tahun 2007 dengan otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam prosedur pencatatan transaksi keuangan pada PTKAP.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori- teori yang mendasari tentang topik penelitian yaitu akuntansi sektor publik, Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki, dan teori lainnya yang mendukung keterkaitan tentang topik penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM PAROKI MLATI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Paroki Mlati yang meliputi : sejarah singkat berdirinya Paroki Mlati, pelayanan Pastor Paroki dan Dewan Paroki kepada umat, wilayah pelayanan, arah pelayanan, struktur pelayan umat, kegiatan pelayanan, praktik prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

BAB IV : ANALISA DATA

Dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai analisa data yang dilakukan meliputi: mengidentifikasi prosedur pencatatan transaksi keuangan dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki yang sudah dilakukan Paroki Mlati dalam

pencatatan transaksi keuangannya pada tahun 2007, membandingkan otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati tahun 2007 dengan aturan langkah pelaksanaan, penggunaan dokumen, dan otorisasi dalam prosedur pencatatan transaksi keuangan pada Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki, membuat kesimpulan atas hasil perbandingan antara otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam pencatatan transaksi keuangan Paroki Mlati tahun 2007 dengan otorisasi, penggunaan dokumen, dan praktik langkah pelaksanaan dalam prosedur pencatatan transaksi keuangan pada Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa data yang telah dilakukan.

